



## Pancasila Sebagai Strategi Ketahanan Bangsa di Era Disinformasi Digital

Nabila Azzahra<sup>1\*</sup>, Dimas Ragil Sudiro Putro<sup>2</sup>, Vito Arviansyah<sup>3</sup>, Herli Antoni<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pakuan, Kota Bogor, Indonesia

Alamat: Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat  
16129

\*Korespondensi penulis: [nabilaazzahra2900@gmail.com](mailto:nabilaazzahra2900@gmail.com)

**Abstract.** *In the era of digitalization, strengthening national identity is important, with the concept of National Defense as the main strategy. Defending the Nation emphasizes the obligation of every citizen to maintain the country's defense and security, especially amidst the threat of digitalization which can change cultural values and national identity. This research aims to examine the role of the concept of National Defense in strengthening national identity and increasing public awareness of the importance of defending the country. By maintaining the principles of Bhinneka Tunggal Ika and Pancasila, defending the country becomes a means of protecting Indonesia's unity, culture and sovereignty in the digital era.*

**Keywords:** Pancasila, National Identity, Digitalization

**Abstrak.** Di era digitalisasi ini, penguatan jati diri bangsa menjadi hal yang penting, dengan konsep Pertahanan Negara sebagai strategi utama. Bela Negara menekankan kewajiban setiap warga negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, terutama di tengah ancaman digitalisasi yang dapat mengubah nilai-nilai budaya dan identitas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran konsep Pertahanan Negara dalam memperkuat identitas bangsa dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara. Dengan mempertahankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, bela negara menjadi sarana untuk melindungi persatuan, budaya, dan kedaulatan Indonesia di era digital.

**Kata kunci:** Pancasila, Identitas Nasional, Digitalisasi

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum di dalam konstitusi (Pembukaan UUD 1945), hal tersebut Membangun kesejahteraan masyarakat melalui sektor pendidikan Memberikan anggaran tertinggi dibandingkan sektor lain yang diatur dalam UUD. Dalam misi tersebut Negara menghadirkan Ilmu Civic Education sebagai sarana mendidik generasi bangsa untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon- calon penerus bangsa. Implementasi pendidikan yang kurang optimal berdampak pada kualitas sumber daya manusia peserta didik karena kurang optimal sehingga memudahkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila sehingga berujung pada tindak pidana. Di sisi lain, era digital memiliki dampak negatif selain berdampak positif terhadap masyarakat sekitar, jumlah pengguna internet khususnya media sosial dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun kejahatan di dunia maya juga semakin meningkat.

Tidak dipungkiri Dunia digital membawa bahaya dan ancaman bagi penggunanya, seperti kekerasan siber akibat terpaan game online, serta platform digital lainnya. Serta ancaman cyberbullying yang dapat berupa ujaran kebencian dan lelucon. Dan hingga saat ini hoax menjadi pusat perhatian dan bahkan sulit dihentikan penyebarannya karena semua pengguna media digital sibuk, termasuk membuat dan menyebarkan informasi. Hal tersebut mengakibatkan informasi tersebut seringkali diterima oleh masyarakat tanpa adanya filter sehingga para pembacanya tidak melakukan verifikasi atau melakukan pemeriksaan ulang terhadap content yang berisi informasi yang telah diterimanya tersebut.

Dalam menanggapi masalah pemanfaatan teknologi digital untuk tujuan yang lebih mulia, diperlukan suatu pembelajaran yang mampu mengembangkan perilaku literasi digital dalam proses kehidupan dalam masyarakat baik secara formal maupun informal. Pembelajaran tersebut adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang notabene adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas dan berkeadaban berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi disinformasi dan hoaks, serta memberikan rekomendasi mengenai strategi dalam disinformasi di era digital yang efektif, untuk mencegah dan mengatasi penyebaran hoax yang terjadi di era digitalisasi ini. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan praktis dalam upaya meminimalkan dampak negatif dari penyebaran hoax dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji berbagai sumber data yang relevan terkait Ketahanan Bangsa di Era Disinformasi Digital. Sumber data yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah, dan studi kasus yang berkaitan dengan topik. Dalam melakukan tinjauan literatur ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Brahmana India atau bahasa Sansekerta, yaitu kata Panca yang berarti lima dan Sila atau syila yang berarti batu sendi atau dasar. Sila juga berasal dari kata susila yang artinya tingkah laku yang baik. Pengertian Pancasila secara kebahasaan dapat diartikan lima batu sendi atau dasar, atau dapat juga diartikan lima tingkah laku yang baik. Pancasila secara terminologi digunakan oleh Ir. Soekarno pada sidang

BPUPKI pada 1 Juni Tahun 1945 sebagai nama pada lima prinsip dasar negara Indonesia (Basyir, 2013).

Pancasila merupakan perwujudan dari pemikiran budaya, sifat, dan cita-cita bangsa yang menjelma menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari titik temu pluralitas bangsa Indonesia dan lahir dari perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terdiri dari nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius telah ada pada bangsa Indonesia sejak sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut sejak dahulu ada, melekat, dan diamalkan pada kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup masyarakat (Kaelan, 2013).

Pancasila merupakan suatu kesatuan integral dan menyatu yang tidak dapat dipisahkan karena masing-masing sila di dalam Pancasila mencakup keempat sila lainnya, dan tidak memungkinkan untuk menukar atau menggantikan posisinya (Ronto, 2012) Prinsip-prinsip Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi panduan utama dalam merumuskan strategi keamanan digital yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Terdapat lima prinsip atau asas dalam Pancasila, yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menekankan keyakinan dan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh negara Indonesia.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menggarisbawahi perlunya perlakuan adil terhadap setiap individu dan pengembangan akhlak yang baik.
3. Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya persatuan dan saling menghormati dalam keragaman di kalangan bangsa Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang menegaskan bahwa kekuasaan dalam negara dipegang oleh rakyat dan dijalankan dengan bijaksana melalui mekanisme musyawarah atau perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menegaskan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara.

Pemanfaatan teknologi digital harus diarahkan oleh nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila, mencerminkan identitas dan jati diri bangsa. Selain itu, tindakan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital juga mencakup beberapa aspek krusial, seperti

perlindungan terhadap privasi dan keamanan data, pencegahan penyebaran informasi palsu atau hoaks, serta memastikan distribusi akses yang merata dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan semangat Pancasila yang mengedepankan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Aisyah & Najicha, n.d.).

Pendidikan kewarganegaraan mendukung dan memperkuat politiknya. Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri adalah agar warganya menjadi warga negara yang baik, karena warga yang baik secara tidak langsung mendukung keberlangsungan negara yang bersangkutan. Proses dari pendidikan Kewarganegaraan itu untuk memberdayakan. Pendidikan Kewarganegaraan, sering disingkat PKn, merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Mata pelajaran ini tidak hanya mengajarkan tentang aturan dan hukum yang berlaku, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, seperti Pancasila, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga negara dalam hubungannya dengan negara, bangsa, dan masyarakat.

Singkatnya, pendidikan ini mengajarkan kita tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana cara kita berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkualitas, berkarakter, dan aktif dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan ini, individu diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta nilai-nilai luhur bangsa. Tujuan utamanya adalah rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur.

### **Pancasila Sebagai landasan hidup masyarakat yang berbangsa**

Pancasila sebagai dasar, pandangan dan ideologi bangsa yang mengandung nilai nilai berakar dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang dapat menjadi pemersatu bangsa dalam keberagaman (Kariyadi, 2017). Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, ras, agama, dan budaya, sehingga memerlukan suatu perekat sebagai identitas sebagai dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila menjadi ideologi yang kokoh dan terus relevan terutama saat masyarakat menghadapi perbedaan suku, ras, agama (Bhagaskoro, 2019).

## **Nilai Pancasila Sebagai Panduan Etikan Dalam Menghadapi Tantangan Keamanan di era digitalisasi**

Dalam menghadapi tantangan keamanan digital, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai pedoman etika yang membimbing langkah-langkah dalam menjaga keamanan cyber. Pembahasan mengenai etika digital dalam rangka nilai-nilai Pancasila menyoroti pentingnya penggunaan teknologi secara tanggung jawab, selaras dengan prinsip moral Pancasila. Media sosial sebagai ruang publik yang sangat bebas memerlukan perhatian khusus terhadap etika dalam interaksi antar individu di platform ini. Etika yang harus diterapkan dalam dunia digital harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila (Safitri & Anggeraeni, 2021).

Etika digital memiliki hubungan erat antara nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan persatuan yang memiliki inti Pancasila. Dalam menghadapi penyebaran informasi di media sosial, penting untuk menerapkan etika dengan cara menyaring informasi sebelum membagikannya dan menghindari penyebaran berita palsu yang dapat merusak persatuan masyarakat..

### **Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Ketahanan Digital yang Tangguh**

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam keamanan digital tidak hanya terbatas pada kerumusan dan kebijakan, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari masyarakat. Pendidikan dan sosialisasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan etika dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam era digital bukan sekedar adaptasi, melainkan menguatkan karakter yang mengutamakan etika, tanggung jawab, dan persatuan. Dengan memanfaatkan beberapa peluang yang ada, masyarakat dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan kompleks di era teknologi modern, selain itu dialog dan kolaborasi di lintas sektor harus terus didorong agar nilai-nilai luhur Pancasila tetap menjadi pedoman dalam merespon dinamika serta peluang yang muncul di dunia digital yang terus berkembang (Ashari, 2023)

### **Ancaman penyebaran berita palsu (Hoaks)**

Penyebaran berita palsu atau disinformasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam demokrasi Pancasila di era digital. Dengan kemudahan akses melalui media sosial, hoaks mudah tersebar secara cepat dan meluas, menjangkau beberapa kalangan dalam waktu singkat masalah ini tidak hanya berdampak pada individu, melainkan dapat mengancam stabilitas dan integritas proses demokrasi Pancasila.

Berita palsu serung dimanfaatkan untuk memanipulasi opini public, menjatuhkan orang lain, dan mempropokasi kerusuhan sosial. Dampak nya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterima, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas bangsa

### **Solusi mengatasi disinformasi di era digital**

Dalam menghadapi ancaman disinformasi di era digital, strategi ketahanan bangsa tidak hanya mengandalkan tidakan individu atau kebijakan pemerintah semata. Diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk media, lembaga akademis, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan, langkah-langkah berikut yang dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi disinformasi:

#### **1. Meningkatkan Literasi Digital**

Disinformasi sering digunakan untuk membentuk opini yang salah melalui narasi yang palsu. Hal ini berpotensi mengancam persatuan bangsa jika dibiarkan tanpa pengendalian. Oleh karna itu, literasi digital menjadi kunci utama dalam menangkal dampak disinformasi.

#### **2. Regulasi yang kuat dan tepat**

Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan algoritma media sosial tidak mendukung penyebab disinformasi. Kerja sama ini juga dapat mendorong transparansi dalam penggunaan teknologi digital guna memastikan keamanan informasi kepada masyarakat.

#### **3. Peningkatan kesadaran public**

- Kampanye kesadaran: Melalui media sosial, TV atau kegiatan masyarakat, tingkatkan kesadaran tentang dampak buruk nya disinformasi.
- Penggunaan tokoh masyarakat: Melibatkan pemimpin opini atau *influencer* untuk mempromosikan pentingnya verifikasi informasi.

#### **4. Pemberdayaan Media**

- Cek fakta: Memperkuat peran lembaga pemeriksa untuk mengidentifikasi dan membantah hoaks secara transparan.
- Jurnalisme: Mendorong media untuk menyajikan informasi yang berkualitas dan akurat.

#### 4. KESIMPULAN

Penguatan identitas nasional melalui Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sangat penting di era digital, terutama dalam menghadapi disinformasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membantu masyarakat dalam melawan hoaks dan memperkuat ketahanan bangsa. Rekomendasi termasuk peningkatan literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga integritas informasi.

#### DAFTAR REFERENSI

- Abdusshomad, A. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penguatan keamanan digital di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 474–480. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14061895>
- Ashari, F. A. (2023). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam era digital. ResearchGate.
- Basyir, K. (2013). Pancasila dan kewarganegaraan. Sunan Ampel Press.
- Bhagaskoro, P. U. (2019). Pancasila dalam interaksi kearifan lokal dan ideologi transnasional. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 112.
- Dewi, A. (2024). Implementation of Pancasila in the digital era. *Jurnal Setia Pancasila*, 4(2), 49–58. <https://e-jurnal.stkipgrisumenep.ac.id/index.php/JSP>
- Kaelan. (2013). Negara kebangsaan Pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis dan aktualisasinya. Paradigma.
- Kariyadi. (2017). Membangun kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila dalam perspektif masyarakat multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 86–96.
- Karsayuda, H. M. R., & Tektona, R. I. (2021). Ketahanan ideologi Pancasila dalam menghadapi distrupsi revolusi industri 4.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 112–129. <https://doi.org/10.22146/jkn.65002>
- Kusnadi. (2023). Pendidikan kewarganegaraan berbasis literasi digital: Suatu alternatif pembelajaran karakter menumbuhkan keadaban kewargaan. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1).
- Louis, C., Nastiti, A. A., Nabilla, A. S., Kenanya, Z., Isnawati, N., & Ghozali, I. (2024). Konsepsi bela negara sebagai strategi penguatan identitas bangsa dalam era globalisasi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(3). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Mudrikah, A., Jayanti, E. F., Setiaulia, T. C., Syaputra, T. A. R., & Hasibuan, H. A. (2024). Tantangan terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila di era digital. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(4), 290–303. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3320>

- Naibaho, L., Andriani Nainggolan, J., Hutapea, N. M., Lumban Tobing, S., Bangun, D. Y. B., & Rachman, F. (2024). Peran kewarganegaraan dalam pendidikan untuk menanggulangi disinformasi dan hoaks di era media sosial pada kampanye pemilihan umum tahun 2024: Perspektif siswa/i SMA Swasta Eria Medan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4). <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Ronto. (2012). *Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara* (1st ed.). Balai Pustaka.
- Tinambunan, K., Situmorang, S. H., Naiborhu, M., & Purba, A. (2022). Hubungan literasi digital dengan implementasi nilai-nilai Pancasila siswa kelas XII SMK Swasta Harapan Bangsa tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 47–61.